

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

PAD adalah penerimaan suatu daerah yang dilihat dari beberapa sumber pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan dari pengambilan. Pendapatan daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang bisa disesuaikan dengan undang-undang PAD, pajak adalah sebuah kas negara untuk membiayai pengeluaran dan surplusnya untuk investasi publik. Undang-undang No 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang yang sangat luas, serta mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai semua yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu peran penting dalam menentukan kemampuan daerahnya untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program - program pembangunan, oleh karena itu pemerintah daerah tidak harus bergantung terus kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan keandalan yang dimiliki daerah

agar dapat menghasilkan sumber yang cukup untuk pendapatan daerahnya sendiri.

Untuk memajukan suatu otonomi daerah yang optimal, maka diberlakukannya adanya desentralisasi fiskal yaitu mempunyai makna bahwa pembagian tanggung jawab dan kepuasan dalam aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran (Hastuti, 2018) Otonomi daerah yang dipegang oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah menjadi tujuan agar pemerintah daerah mampu memajukan daerahnya sendiri karena pemerintah daerah yang lebih paham apa yang menjadi potensi daerah tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah adalah pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menurut kuznetz adalah sebagai peningkatan jangka panjang dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi sering dilihat dari sudut pandang PDRB. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada suatu tahun tertentu dengan PDRB sebelumnya.

Dalam teori ekonomi makro telah dijelaskan dari sisi pengeluaran dan pendapatan regional bruto adalah jumlah dari semua variabel yang di dalamnya yaitu investasi. Investasi yang ada di daerah berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Jika dilihat dari sektor swasta investasi ini berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan investasi

pemerintah untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh publik. Tidak hanya investasi, jumlah tenaga kerja juga merupakan faktor penting untuk mempengaruhi output suatu daerah.

Berdasarkan dalam Undang-undang No 24 tahun 2004 telah dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan keberhasilan daerahnya sendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat suci Al Quran pada Surah Al-Ahzab : ayat 72 .

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia.

Berdasarkan ayat diatas bahwa pemerintah harus memiliki tanggung jawab dan amanah dalam mengemban jabatannya, terutama dalam sektor keuangan dimana harus memiliki tanggung jawab yang lebih agar hasil yang diperoleh dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memikirkan rakyatnya agar hidup makmur dan sejahtera.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus ditingkatkan secara optimal, jika suatu daerah pendapatannya meningkat maka pemerintah daerah tidak lagi bergantung

pada pemerintah pusat, dengan adanya peningkatan profit PAD maka akan mencapai perekonomian yang baik, tetapi jika suatu daerah mengalami kesusahan maka akan mengalami ketidakseimbangan ekonomi. Dalam penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa PAD mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan otonomi suatu daerah. Bertambahnya peningkatan PAD maka akan bertambahnya sektor pembangunan daerah dan daerah tersebut akan berkembang jauh lebih baik Tujuan adanya pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. PAD mempunyai beberapa aspek seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut tabel penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota karesidenan pekalongan pada tahun 2014-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Pendapatan Asli daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2014-2021 (Juta Rupiah)**

PENDAPATAN ASLI DAERAH								
No	Tahun	Kabupaten Tegal	Kabupaten Pemasang	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Batang	Kota Tegal	Kota Pekalongan
1	2014	253.716.603	217.345.440	267.772.513	255.037.017	172.638.217	241.936.168	144.075.424
2	2015	255.732.920	190.241.690	262.781.937	238.975.251	149.106.696	229.575.381	150.191.892
3	2016	275.013.096	212.482.621	311.818.549	270.908.898	159.105.341	258.668.643	160.542.382
4	2017	375.531.165	425.893.267	528.836.444	305.394.299	219.807.129	306.830.656	192.002.871
5	2018	372.282.676	300.481.887	346.907.973	311.288.144	237.547.973	275.021.448	179.224.409
6	2019	436.003.393	350.559.140	379.091.299	341.344.415	245.836.087	297.677.322	212.777.435
7	2020	450.742.220	309.060.518	398.649.681	466.818.350	246.398.163	333.012.742	218.020.320
8	2021	433.822.920	256.170.942	413.148.097	479.807.094	268.423.944	372.133.887	203.812.400

Sumber : Badan Pusat Statistika Prov Jateng

Pendapatan Asli Daerah Eks-karesidenan pekalongan setiap tahunnya meningkat, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah mengalami peningkatan, akan tetapi ada beberapa Kabupaten/kota yang peningkatannya cukup signifikan seperti Kabupaten tegal dan Kabupaten Pekalongan, tetapi di tahun 2020 Kabupaten pemalang mengalami penurunan yang cukup jauh dari sebelumnya, mungkin karena adanya wabah covid-19. Adanya covid-19 ini berdampak pada seluruh aspek terutama disektor ekonomi hal ini dipastikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, terlebih lagi adanya pembatasan sosial yang mengakibatkan aktivitas masyarakat sangat berkurang. Akan tetapi dilihat pada tahun 2014-2021 bahwa Pendapatan Asli daerah mayoritas mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun ada sedikit penurunan.

Pendapatan Asli daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan adalah Kabupaten/Kota yang cukup baik untuk meningkatkan fungsi dari otonomi daerah dan memiliki kualitas yang dilihat dari penerimaan daerah yang menjadi point utama yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu hal tersebut dapat dijadikan acuan yang baik untuk perekonomian suatu wilayah khususnya di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka pendapatan daerah dilihat dari beberapa sumber penerimaan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah dapat didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih pada periode tersebut. Secara garis besar APBD yang

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota Eks-karesidenan Pekalongan pada tahun 2014-2021 sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2014-2021**

Tahun	Kabupaten Tegal	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Batang	Kota Tegal	Kota Pekalongan
2014	1.843.352,063	1.687.338,257	2.043.920,281	1.474.500,636	1.211.216,990	818.667,346	762.110,364
2015	2.097.091,623	1.966.423,490	2.417.210,235	1.697.594,551	1.697.594,551	947.468,621	809.733,612
2016	2.359.364,391	1.803.937,319	2.626.314,944	1.854.438,065	1.598.333,412	1.032.686,389	901.083,866
2017	2.450.766,552	2.353.030,275	2.857.109,730	2.067.907,852	1.566.154,721	1.024.765,938	915.920,377
2018	2.524.365,920	2.428.263,886	2.854.043,939	2.101.449,302	1.701.877,299	987.244,236	905.231,573
2019	2.755.677,484	2.636.036,844	3.096.826,845	2.182.770,952	1.769.958,202	1.036.963,763	971.624,464
2020	2.875.037,755	2.581.626,461	3.129.412,939	2.318.988,833	1.840.617,426	1.132.970,758	981.361,482
2021	2.854.829,735	2.854.829,735	3.258.452,215	2.232.259,762	1.911.771,478	1.267.780,719	988.198,191

Sumber : BPS Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan

Penerimaan Pendapatan Asli daerah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pemerintah perlu memantau keunggulan didaerah tersebut. Penerimaan PAD juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi perekonomian daerah pasti akan semakin meningkat perkonomiann daerah tersebut. Selain itu keberhasilan suatu pembangunan perekonomian dari suatu daerah melalui PDRB yang dapat diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang didapatkan oleh semua kegiatan ekonomi yang berjalan didaerah tersebut. PDRB memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah seperti PDRB, Jumlah Unit Bisnis diantaranya UMKM, jumlah kendaraan bermotor dan jumlah bangunan rumah. Oleh karena itu salah satu cara untuk memajukan

perekonomian daerah adalah dengan melihat pertumbuhan PDRB. PDRB juga termasuk harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dalam tahun dasar.

**Tabel 1. 3 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2014-2021 (dalam %)**

Tahun	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)					
	Kabupaten Tegal	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Brebes	Kabupaten Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Tegal
2014	5.03	5.52	5.30	4.95	5.48	5.04
2015	5.49	5.58	5.98	4.78	5.00	5.45
2016	5.92	5.43	5.11	5,19	5,36	5,49
2017	5.38	5.61	5.65	5,44	5,32	5,95
2018	5.51	5.69	5.26	5,76	5,69	5,87
2019	5.56	5.80	5.72	5,35	5,5	5,77
2020	-1.48	-0.61	-0.59	-1.89	-1,87	2,25
2021	3.72	4.19	2.33	3.54	3.59	3.12

Sumber : BPS Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan

Berdasarkan pada tabel laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan pada tahun 2014-2021 bahwa setiap tahunnya bisa dikatakan signifikan atau terus bertambah, tetapi pada tahun 2020 semua mengalami penurunan yang cukup drastis karena adanya covid-19 yang berdampak pada semua aspek perekonomian. Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2019 mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen lebih. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten pemalang mencapai 5.80 persen. Angka pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014-2021 hampir semuanya diatas 5,5 persen dan lebih tinggi dari pada tahun 2020, pada tahun 2020 mengalami

penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis hampir semuanya angkanya negatif.

Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi yang tertinggi ada di kota tegal yaitu mencapai 5,87 persen pada tahun 2018. Bisa kita simpulkan bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis dan pastinya berdampak disemua bidang kategori yang akhirnya mengalami penurunan PDRB. Jika berdasarkan tabel diatas bahwa laju pertumbuhan PDRB yang paling rendah pada tahun 2020 adalah Kabupaten pekalongan. Oleh karena itu faktor ini yang menjadi pelajaran untuk pemerintah agar dapat menstabilkan perekonomian di tahun berikutnya.

Selain PDRB masih ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti Jumlah Unit Bisnis, dimana Jumlah Unit Bisnis adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita pada suatu daerah. Oleh karena itu UMKM berperan penting dalam peningkatan PDRB dan dapat meningkatkan pajak daerah. Jika dilihat dari skala ekonomi bahwa UMKM adalah salah satu aspek yang berkontribusi untuk meningkatkan PDRB, karena meningkatnya jumlah UMKM disuatu daerah akan berdampak pada pendapatan perkapita, sehingga dapat meningkatkan PDRB dan pajak daerah. UMKM juga mendapatkan dukungan dan dipermudah oleh pemerintah karena berperan aktif dalam memperoleh pendapatan asli daerah.



Kemudian tidak hanya PDRB, UMKM, Jumlah Kendaraan bermotor juga memiliki peran yang penting dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, karena disetiap tahunnya jumlah kendaraan pasti akan meningkat dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, oleh karena itu semakin naiknya jumlah kendaraan, maka akan meningkatkan pendapatan pajak kendaraan. Semakin tinggi kendaraan maka akan semakin tinggi pula penerimaan pendapatan asli daerah. Sama seperti jumlah kendaraan, jumlah bangunan juga pasti akan meningkat setiap tahunnya, sebab semakin banyaknya bangunan rumah akan mempengaruhi pendapatan pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan. Karena setiap rumah diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini yang mempengaruhi meningkatnya pajak daerah.

Dalam penelelitian ini ada beberapa studi kasus sebagai landasan penelitian :

Hikmahyanti, N. & Soelistyo, A. (2021) telah melakukan penelitian yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan data panel dan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penduduk, PDRB, Jumlah Industri dan Belanja Pemerintah signifikan terhadap PAD.

Wikardojo, S. (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Malang*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap PAD di Kabupaten Malang, menganalisis pengaruh UMKM terhadap PAD di Kabupaten Malang, menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UMKM terhadap PAD di Kabupaten Malang. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, berdasarkan penelitian tersebut bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Malang. Usaha mikro kecil menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Malang. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan UMKM berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Malang.

Priyono, D. & Handayani, H.R. (2021) telah melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks karesidenan Pati Tahun 2012-2018*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012-2018. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, total penduduk memiliki pengaruh tertinggi. Dilihat hasil simultan bahwa variabel PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh positif terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Apabila variabel tersebut dapat dioptimalkan maka kegiatan Eks Karesidenan Pati akan berkembang dengan baik.

Hadi, T. dkk (2020) telah melakukan penelitian yang berjudul *“Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui PKB”* tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan PKB di provinsi Jambi periode 2000-2008, dan untuk menganalisis jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, kebijakan pemerintah dan penerimaan PKB terhadap pertumbuhan ekonomi di Jambi dalam periode 2000-2018. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor mempengaruhi PKB, kemudian jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor berdampak positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Juwita, R. dkk (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul *“Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada pemerintah Kabupaten Ciamis Periode 2018-2020”* Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten Ciamis Periode 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis.

Natalia, R. (2017) telah melakukan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Jumlah Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Barat*”

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis potensi dan kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB.

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan yang memiliki berbagai macam perbedaan mulai dari sumber pendapatan maupun pajak daerah. Seperti halnya PDRB dimana seluruh Kabupaten/Kota pasti memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. PDRB juga berpengaruh pada jumlah penduduk dimana semakin banyaknya penduduk pasti akan semakin terbuka juga lapangan usaha seperti halnya pada jumlah unit bisnis yaitu umkm dimana umkm disetiap daerah pasti berbeda-beda karena banyak sekali aneka ragam jenis umkm. Sama seperti jumlah kendaraan bermotor dan jumlah bangunan rumah dimana setiap daerah pasti berbeda-beda, contohnya seperti dikota biasanya lebih banyak kendaraan bermotor dibanding diKabupaten, sama seperti bangunan rumah pasti ada daerah yang masih banyak sekali lahan untuk dibangun rumah. Oleh karena itu PDRB, Jumlah Unit Bisnis, Jumlah kendaraan dan Jumlah bangunan sangat mempunyai pengaruh besar untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah sehingga mampu meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah maupun pendapatan lainnya yang sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN/KOTA EKSKARESIDENAN PEKALONGAN PADA TAHUN 2014-2021”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Untuk membatasi pembahasan masalah yang peneliti bahas dan dengan melihat potensi yang pasti berbeda-beda disetiap daerah, kemudian ingin mewujudkan pembangunan ekonomi yang maksimal khususnya di eks-karesidenan pekalongan, maka riset ini akan melihat bagaimana PDRB, Jumlah Unit Bisnis, Jumlah kendaraan Bermotor dan Jumlah Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah. Studi kasus dari penelitian ini pada Eks-Karesidenan Pekalongan yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

## **C. Rumusan Masalah**

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan terbesar, PAD juga sangat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti mengambil beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Eks-karesidenan Pekalongan pada tahun 2014-2021?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Eks-karesidenan Pekalongan pada tahun 2014-2021?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan Bisnis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Eks-Karesidenan Pekalongan pada tahun 2014-2021?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Eks-karesidenan Pekalongan pada tahun 2014-2021?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari peneliti ini adalah :

1. Dapat mengetahui apakah PDRB mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dapat mengetahui apakah Jumlah kendaraan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Dapat mengetahui apakah Jumlah Unit bisnis mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Dapat mengetahui apakah Jumlah bangunan Rumah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**E. Manfaat Penelitian**

1. Menambah pengetahuan pembaca terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Eks-karesidenan Pekalongan.
2. Data penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dalam menyusun penelitian yang sama.
3. Mampu menjadi gambaran pemerintah agar lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat daerah.